

## **BAB 2**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Efektivitas Program**

Efektivitas merujuk pada derajat keberhasilan suatu tindakan dalam membuahkan hasil yang diinginkan. Emerson (1912) menitikberatkan efektivitas sebagai rasio pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks birokrasi, sebuah program merupakan artikulasi dari rencana strategis yang mencakup berbagai aktivitas terstruktur, didukung oleh alokasi sumber daya tertentu, dan ditujukan untuk memecahkan masalah publik (Kogoya et al., 2021).

Untuk membedah sejauh mana sebuah inisiatif sosial dapat dikatakan berhasil, Sutrisno (2020) mengemukakan lima indikator yang perlu diperhatikan, diantaranya:

##### **1. Pemahaman Program**

Pemahaman program mencakup sejauh mana para pelaksana dan pemangku kepentingan memahami filosofi serta mekanisme operasional kegiatan tersebut. Pihak yang dimaksud adalah orang-orang yang terlibat dalam proses kegiatan program yang dijalankan. Ketika hal tersebut terjadi, maka program dikatakan efektif dalam proses pelaksanaannya.

##### **2. Ketepatan Sasaran**

Ketepatan sasaran mencakup kesesuaian antara profil penerima manfaat di lapangan dengan kriteria objektif yang telah digariskan dalam regulasi. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila program sesuai dengan sasaran yang telah dirumuskan sejak awal.

##### **3. Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu mencakup kemampuan organisasi dan atau instansi dalam mengeksekusi tahapan kegiatan sesuai dengan linimasa yang direncanakan. Semakin sesuai dengan linimasa yang direncanakan, maka semakin efektif program dapat terealisasikan.

#### 4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan mencakup ukuran kuantitatif dan kualitatif mengenai sejauh mana visi awal program telah terwujud. Tercapainya tujuan pada program pemberdayaan masyarakat dapat dinilai efektif berdasarkan objektif tersebut.

#### 5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata menyiratkan adanya perubahan fundamental dan nyata pada penerima manfaat, yang menandakan bahwa kebijakan tersebut bukan sekedar rutinitas administratif. Ini mencakup regulasi yang telah ditetapkan sejak awal dapat direalisasikan dengan baik sesuai dengan rencana.

Selain itu, Goodman & Pennings (1981) mengemukakan efektivitas suatu program yang dijalankan oleh organisasi dapat diukur melalui lima dimensi strategis. Dimensi tersebut dimulai dari realisasi program yang selaras dengan tujuan awal, serta pencapaian sasaran yang menitikberatkan pada perolehan *output*. Selain itu, kepuasan pengguna juga menjadi standar penting untuk menguji apakah program tersebut relevan. Dari sisi operasional, keseimbangan *input-output* harus diperhatikan agar tercipta efisiensi kerja. Keberhasilan tujuan secara umum menjadi landasan bagi penilaian efektivitas organisasi secara komprehensif, yang mencakup seluruh peran dan fungsi yang telah dijalankan (Faradiba et al., 2021).

### **2.1.2 Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi secara umum dipahami sebagai suatu proses pemulihan seseorang untuk pulih dari dampak buruk yang disebabkan kejahatan, trauma, maupun disabilitas. Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan, peningkatan, penyembuhan, pemakaian, serta pemulihan kemampuan bagi individu yang membutuhkan layanan khusus. Adapun menurut Astutik (2014) tujuan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Memulihkan Kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
2. Memulihkan Kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

3. Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
4. Pasien mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis dan sosial, dalam arti lain, adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukannya dan apa yang tidak dapat dilakukannya.

Widati (1984) menyebut, bidang pelayanan rehabilitasi digolongkan menjadi tiga, dimana salah satunya adalah rehabilitasi bidang sosial. Rehabilitasi sosial mengacu pada usaha untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi yang baik dari seseorang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Menurut Sukmana (2022), fokus utamanya adalah memperbaiki disfungsi sosial agar subjek mampu berinteraksi kembali secara normal dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Proses rehabilitasi ini melibatkan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek fisik, psikologis, dan relasi sosial, untuk menyembuhkan trauma serta memulihkan martabat individu yang sempat hilang akibat masalah kesejahteraan. Usaha rehabilitasi sosial menurut pendekatan pelayanan sosial dilaksanakan menurut tiga sistem, yaitu sistem panti, sistem non-panti yang berbasis masyarakat, dan lingkungan pondok sosial. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga sistem tersebut.

1. Sistem Panti (*Institutional Based*)

Layanan dalam sistem ini bersifat intensif dan menyeluruh, di mana subjek ditempatkan dalam lingkungan terkontrol seperti asrama atau panti rehabilitasi. Di dalam institusi ini, individu mendapatkan bimbingan fisik, mental, dan pelatihan keterampilan secara rutin dan terstruktur. Sistem panti menjadi pilihan yang paling efektif bagi kasus-kasus dengan tingkat disfungsi yang berat atau bagi mereka yang membutuhkan pengawasan medis dan keamanan selama 24 jam. Keunggulan sistem ini terletak pada ketersediaan fasilitas penunjang yang lengkap dan tenaga ahli yang selalu siaga, meskipun tantangannya adalah potensi terjadinya ketergantungan individu terhadap institusi.

## 2. Sistem Non-Panti/Berbasis Masyarakat (*Community Based*)

Sistem ini lebih fleksibel karena dilakukan di luar lembaga resmi. Masyarakat terlibat langsung sebagai agen pemulihan. Kelebihannya, subjek tidak tercabut dari akar sosialnya sehingga proses adaptasi dengan lingkungan nyata berjalan lebih natural.

## 3. Lingkungan Pondok Sosial (*Liponsos*)

Sistem ini merupakan sistem yang memadukan pemukiman sementara dengan pembinaan sosial. Tujuannya adalah memberikan ruang transisi bagi individu agar tidak langsung terkejut saat kembali ke masyarakat luas.

### **2.1.3 Anak Terlantar**

Anak terlantar merupakan manifestasi dari kegagalan sistem pendukung utama, yakni keluarga. Kondisi ini muncul saat orang tua abai atau tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan esensial anak, baik secara material maupun afeksi. Dampak yang timbul bersifat sistemik, mulai dari ancaman gizi buruk hingga hilangnya kesempatan mengenyam pendidikan (Ruswanto & Senjaya, 2023).

Fenomena anak yang turun ke jalan untuk mengemis seringkali dipicu oleh faktor multidimensional. Secara mendasar, Fauzan Khibran et al. (2023) menegaskan bahwa determinan utama yang mendorong anak ke jalanan mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Kemiskinan struktural sering kali menjadi pemicu awal, di mana keterbatasan finansial keluarga memaksa anak untuk melepaskan hak pendidikannya demi membantu stabilitas dapur. Namun, kondisi ini diperparah oleh lingkungan sosial yang permisif, di mana mengemis dianggap sebagai solusi instan dan lumrah untuk mengatasi kesulitan hidup tanpa memerlukan keterampilan khusus. Menariknya, motivasi di balik aktivitas ini telah bergeser dari sekadar strategi bertahan hidup menjadi upaya pemenuhan kebutuhan yang lebih konsumtif. Sejalan dengan temuan Setyaningrum (2014), aspek ekonomi tidak lagi berdiri sendiri sebagai jeratan kemiskinan, melainkan juga sebagai peluang keuntungan finansial yang menjanjikan. Pendapatan dari hasil mengemis sering kali dianggap cukup besar untuk memenuhi tuntutan gaya hidup modern yang kian merambah ke lapisan masyarakat bawah. Anak-anak jalanan kini tidak

hanya mengemis untuk makan, tetapi juga untuk mengejar standar sosial tertentu, seperti gaya berpakaian, uang jajan yang berlebih, hingga kepemilikan barang elektronik seperti *smartphone*. Ketergantungan pada barang-barang konsumtif ini menciptakan siklus baru yang sulit diputus. Ketika pendidikan tidak lagi dipandang sebagai investasi masa depan karena prosesnya yang lama, hasil instan dari mengemis menjadi pilihan rasional bagi mereka untuk tetap relevan dalam pergaulan. Akibatnya, terjadi degradasi nilai di mana gengsi dan gaya hidup menjadi motor penggerak utama di balik tangan yang menengadahkan. Tanpa adanya intervensi yang menyentuh akar persepsi gaya hidup dan perbaikan akses pendidikan, fenomena ini akan terus berulang karena jalanan telah bertransformasi menjadi lahan mencari modal untuk memenuhi ambisi gaya hidup yang salah arah.

## **2.2 Hasil Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan topik penelitian yang dipilih oleh penulis, khususnya di Indonesia dalam lima tahun terakhir terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya oleh Ishlahiyah & Yuliani (2024), Mahendra & Lodan (2024), Mutmainah (2024), Rufai Warfandu & Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (2024), Wiryawan (2024).

Penelitian pertama dilakukan oleh Mutmainah (2024) berjudul “Proses Rehabilitasi Sosial Terhadap Perubahan Perilaku Anak Terlantar Dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial” di daerah Jakarta Utara di Panti sosial asuhan anak utama 2 dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif dengan instrument wawancara, obesrvasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa rehabilitasi yang sistematis (dari asesmen hingga terminasi) terbukti mampu mengubah perilaku anak menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.

Kemudian penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ishlahiyah & Yuliani (2024) yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan, dan orang Terlantar (PGOT) (studi kasus pada rumah singgah trengginas di kabupaten tegal” penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan instrument wawancara dan studi dokumentasi, penelitian ini menemukan program bagi PGOT di Rumah Singgah dinilai efektif

karena adanya sinkronisasi yang baik antara kebijakan dan eksekusi di lapangan.

Selanjutnya penelitian oleh Wiryawan (2024) dengan judul “Analisis Efektivitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal” penelitian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan kualitatif, dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kabupaten Tegal sudah cukup optimal, tetapi masih terdapat kendala. Kendala utama ialah infrastruktur dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola.

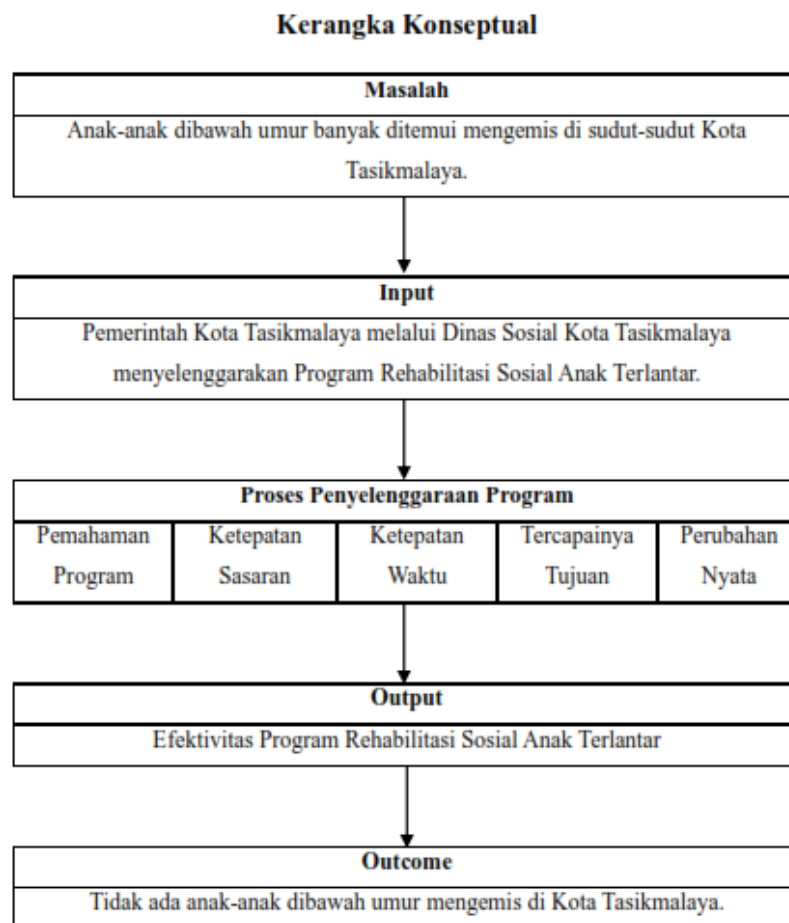
Lalu, penelitian keempat oleh Mahendra & Lodan (2024) dengan judul “Evaluating the Effectiveness of Social Rehabilitation Programs for Beggars in Batam: Challenges and Strategic Interventions” penelitian ini dilaksanakan di kota Batam, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan instrumen penelitian wawancara langsung dengan Informan yaitu pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan studi pustaka. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi program rehabilitasi pengemis di Kota Batam terhambat oleh inkonsistensi SOP, kurangnya responsivitas anggaran meskipun dukungan kebijakan cukup kuat.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Rufai Warfandu & Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (2024) yang berjudul “Efektifitas Pelayanan Sosial dan Pembinaan Anak Jalanan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara semi-terstruktur dengan informan dari Kantor Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), LSM, serta tokoh masyarakat dan agama sebagai instrumen. Temuan dari penelitian ini adalah program-program yang dilaksanakan belum sepenuhnya efektif karena absennya regulasi daerah (Perda) yang spesifik, berakibat pada minimnya dukungan anggaran dan perencanaan.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Melihat fenomena yang ada, yaitu masih banyak ditemui anak-anak dibawah umur mengemis di sudut-sudut Kota Tasikmalaya, penelitian ini bermaksud untuk

melihat efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebagai respon dari permasalahan tersebut. Dalam melihat efektivitas program Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar, menurut Sutrisno (2020) dapat dibagi kedalam lima aspek atau indikator, diantaranya: pemahaman program dari semua pihak yang terlibat dalam proses kegiatan, ketepatan sasaran program, ketepatan waktu pelaksanaan program, ketercapaian tujuan program, perubahan nyata dari dampak adanya program. Berikut ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian yang hendak dilakukan:



Gambar 1 Kerangka Konseptual